

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu penduduk terbanyak di Dunia dan dengan padatnya penduduk membuat limbah rumah tangga meningkat tiap tahunnya. Pengolahan sampah yang terjadi di setiap sudut kota di Indonesia masih menjadi pokok permasalahan hingga saat ini.

Negara yang sehat adalah negara yang mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewujudkan bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera. Tingkat kemakmuran, pola hidup masyarakat pada masyarakat sangat berpengaruh pada komposisi dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkannya. Mengingat masyarakat jaman sekarang yang berperilaku konsumtif maka banyak pula sampah yang dihasilkannya.

Dalam amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah menyebutkan bahwa menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintahan daerah untuk menjamin terselenggarakan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tiap daerah dipastikan memiliki peraturan pengelolaan sampah tersendiri. Dengan demikian, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kemanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan, ada beberapa yang menjadi masalah persampahan dampak dari aktivitas masyarakat, yaitu :

1. Menumpuknya timbunan sampah yang dihasilkan dari masyarakat
2. Masih kurangnya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang melebihi kuota sampah yang disediakan pemerintah

Untuk Kota Batam sendiri, pengelolaan sampah masih kurang efektif. Menumpuknya sampah di TPA membuat empat tahun kedepan membuat batam akan krisis TPA(Tempat Pembuangan Akhir) Sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup kota Batam tahun 2014, jumlah timbunan sampah mencapai nilai 432,264 ton per tahun, artinya setiap hari setidaknya ada kurang lebih 1.184,28 Ton sampah per harinya (Kompas, 2017). Sementara pada tahun 2019, hanya berbeda tipis menurunnya, yaitu 1,114 Ton per harinya (Dinas Lingkungan Hidup, 2019). Hal itu yang membuat Pemerintah kota lebih tegas lagi menyikapi masalah persampahan di Kota Batam

Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif apabila ada kerjasama yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam kaitannya proses formulasi kebijakan dalam hal ini ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013, tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Dari masalah pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Batam membuat para analisis kebijakan mengupayakan alternatif-alternatif apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Batam. Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang kurang diimbangi dengan penambah luasan lahan TPA tentu akan menyebabkan sampah semakin menumpuk di TPA dan masa usia pakai TPA akan semakin pendek. Ketika masa usia pakai TPA telah habis maka solusinya adalah mencari lahan TPA yang baru atau melakukan perluasan lahan di TPA. Tentu upaya ini akan menjadi sulit karena tidak mudah untuk mencari lahan baru seiring bertambahnya kepadatan penduduk. Banyaknya penggunaan sampah plastik salah satu yang membuat sampah semakin menumpuk. Sikap pemerintah Kota Batam dalam menangani masalah sampah di Kota Batam tak kunjung selesai.

Menurut Kraft dan Furlong dalam (Hamdi, 2014:78) menyatakan pengertian formulasi kebijakan sebagai desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan tersebut. Formulasi kebijakan adalah proses awal pembuatan kebijakan. Maka dari itu, disahkannya Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih optimal. Peraturan daerah dibentuk dan dijamin dengan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat

dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya cuma berfokus pada perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Penelitian ini nantinya akan membahas kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan sebab dibentuknya peraturan tersebut.

Dari latar belakang yang diurai di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Formulasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah di kota Batam**”. Penulis akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai Formulasi Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah beserta aktor di dalamnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Formulasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan formulasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah
- b. Untuk mendeskripsikan sikap pemerintah Kota Batam dalam menangani pengelolaan sampah di Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan pemahaman teori tentang pengelolaan sampah dan juga pemahaman tentang konsep peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah
- b. Secara Akademis penelitian ini dapat memberikan wawasan, literatur, dan masukan untuk studi lain yang tertarik untuk dikaji formulasi peraturan daerah dalam pengelolaan sampah
- c. Secara Praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah Kota Batam dan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di Kota Batam.